

SUMMARY

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN YAYASAN PENDIDIKAN(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 33 K/TUN/2015)

Created by TITIN ELIANA

Subject : HUKUM, YAYASAN PENDIDIKAN
Subject Alt : LAW, EDUCATION FOUNDATION
Keyword : Yayasan, Dan Perbuatan Melawan Hukum

Description :

Alasan pemilihan judul adalah bahwa Negara kesejahteraan menghendaki diwujudkannya Bangsa yang cerdas dan dapat bersaing di era GLOBAL oleh karena itu Pendidikan menjadi penting. Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang tidak boleh mencari keuntungan, oleh karena itu bentuk Badan Hukum Yayasan menjadi pilihan. Yayasan sebelum dapat beroperasi melaksanakan kegiatan Pendidikan harus mendapatkan Pengesahan. Pengesahan Yayasan adalah bentuk tindakan Tata Usaha Negara dalam rangka Pengesahan Yayasan. Ketika Keputusan Tata Usah Negara (KTUN) merugikan Masyarakat, maka dapat di ajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut sah atau tidak sah. Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus sesuai dengan Kompetensinya masing- masing sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pihak – pihak yang berperkara juga memiliki legal standing. Keputusan Kasasi pada Mahkamah Agung memutus dan memenangkan Tergugat dengan Alasan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Contributor : AGUS PRIBADIONO
Date Create : 04/08/2017
Type : Text
Format : PDF
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Undergraduate-201341025
Collection : 201341025
Source : Undergraduate Theses of Law
Relation Collection FAKULTAS HUKUM
COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right : @perpustakaan Universitas Esa Unggul 2017

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor